

Memadukan Stabilitas dan Pertumbuhan: Peran Sentral Bank Indonesia

Pemaparan Visi dan Misi

Oleh

Boediono

Disampaikan dalam Kerangka *Fit and Proper Test*
Calon Gubernur Bank Indonesia
Di Hadapan Komisi XI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jakarta, 7 April 2008

Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang saya muliakan,
Hadirin yang saya hormati

Pertama-tama perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, atas undangan kepada saya untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR-RI hari ini. Saya merasa bangga dan terhormat, terutama karena hadir dalam rapat ini dalam kapasitas saya sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebuah institusi yang sangat vital bagi perekonomian nasional kita. Kita semua menyadari bahwa justru karena pentingnya posisi dan peran Bank Indonesia, maka proses pemilihan jabatan tertinggi di dalamnya memang bukanlah sesuatu yang mudah, dan bukan juga sebuah proses yang sekali jadi. Di berbagai negara dengan sistem demokrasi yang sudah dewasa sekalipun, hal demikian juga kerap terjadi.

Itulah esensi sistem *check and balances*, yang menjamin bahwa proses kekuasaan dalam demokrasi terbagi dan bersifat saling mengontrol. Karena itu, adalah suatu hal yang wajar jika terjadi persilangan pendapat, baik di dalam parlemen maupun antara parlemen dan eksekutif, mengenai satu atau beberapa masalah penting.

Namun demikian, saya juga percaya bahwa sekaranglah saatnya bagi kita semua untuk mencari persamaan, mempertemukan perbedaan, serta menyingkirkan ganjalan-ganjalan yang muncul dan pernah terjadi di hari-hari yang silam.

Saya percaya, kita semua menyadari sepenuhnya bahwa saat ini kita tidak lagi memiliki kemewahan untuk memboroskan waktu. Kita harus segera mulai bekerja untuk menjamin kesinambungan stabilitas moneter, memperkokoh peran Bank Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, serta mengikuti dengan seksama, dan memberikan respons yang pas, atas perkembangan yang sedang terjadi dalam perekonomian dunia dan perekonomian nasional.

Begitu banyak hal yang masih perlu kita lakukan. Dan saya paham sepenuhnya bahwa hal tersebut tidak selalu mudah. Namun saya yakin bahwa dengan dukungan dan kepercayaan Saudara-saudara semua, Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Saudara-saudara yang saya hormati

Hadirin yang saya muliakan

Uraian saya akan mencakup dua kelompok permasalahan. Kelompok pertama menyangkut beberapa prinsip dasar yang seyogyanya melandasi pelaksanaan fungsi Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam kaitan ini saya akan mengangkat

empat hal, yaitu (a) bagaimana Bank Indonesia seyogyanya memposisikan diri dalam proses pembangunan nasional, (b) masalah independensi, (c) masalah kompetensi dan (d) masalah kredibilitas lembaga Bank Indonesia. Kesemuanya sangat menentukan apakah Bank Indonesia akan efektif dalam melaksanakan fungsinya. Kelompok kedua menyangkut agenda dan langkah-langkah kongkrit yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas utama Bank Indonesia.

Memposisikan Bank Indonesia dalam Pembangunan

Kita mengawali dengan satu pertanyaan mendasar: apa yang kita inginkan dari Bank Indonesia dalam upaya besar pembangunan nasional? Sesuai dengan fungsinya, dalam jangka panjang kita menginginkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjadi jangkar kestabilan moneter dan keuangan di tanah air, baik dalam masa normal maupun dalam masa yang kurang normal, seperti apabila terjadi gejolak atau bahkan krisis ekonomi. Berperan sebagai jangkar kestabilan ini adalah khittah atau alasan eksistensi bank sentral.

Namun di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bank sentral dituntut pula untuk mendukung, dalam batas-batas yang dimungkinkan khittahnya, sasaran-sasaran pembangunan ekonomi lain. Undang-undang Bank Indonesia mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakannya lembaga ini "harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian". Bank

Indonesia bukanlah pulau terpencil dalam sistem perekonomian nasional.

Sasaran pembangunan ekonomi lain tersebut adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, yang pada dasarnya merupakan domain dari institusi-institusi pemerintahan lain. Melaksanakan fungsi dasarnya (menjaga stabilitas) sebaik-baiknya, sambil mendukung secara pas sasaran pembangunan lain (pertumbuhan, pemerataan) adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan arif oleh Bank Indonesia.

Apabila timbul konflik, Bank Indonesia harus tahu mana yang diprioritaskan. Namun untungnya, konflik itu tidak selalu timbul. Dalam jangka panjang, apabila pembangunan kita artikan sebagai proses yang berkelanjutan atau *sustainable*, sebenarnya ketiga sasaran tersebut sejalan dan bahkan bersinergi satu sama lain. Konflik biasanya timbul karena masing-masing sasaran dilihat dari perspektif waktu yang berbeda. Marilah kita dalami sedikit apa yang kita maksud.

Proses pembangunan yang berkelanjutan secara sederhana dapat dilihat sebagai proses interaksi yang saling menunjang antara stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dalam suasana yang tertib, aman dan stabil masyarakat bergairah untuk berusaha dan berinovasi sehingga kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sumber peningkatan manfaat yang dapat

disebarkan kepada masyarakat baik melalui proses pasar maupun melalui intervensi Pemerintah. Manfaat yang tersebar di masyarakat tersebut akan makin memantapkan kestabilan suasana, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi selanjutnya memungkinkan penyebaran manfaat kepada masyarakat yang, apabila dikelola sehingga manfaat itu tersebar merata, akan makin memantapkan stabilitas. Apabila proses interaksi itu terus berlanjut maka terjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan itu merupakan bagian dari proses kemajuan bangsa, yang juga memerlukan kombinasi dan interaksi dari tiga elemen: keteraturan atau *order*, perubahan atau *change* dan keadilan atau *justice*. Kemajuan adalah *an orderly and just change*.

Tentu, proses itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dimulai, dijaga dan kadangkala dikoreksi pada setiap tahapnya agar sinergi dari stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan itu berlanjut. Ini tugas kita semua. Bank Indonesia sesuai dengan peran utamanya sebagai institusi penjaga stabilitas. Ia harus pandai-pandai menempatkan diri dan memainkan peranannya dalam proses interaksi yang saling menunjang tersebut. Dan untuk itu Bank Indonesia memiliki bekal, antara lain independensinya dalam melaksanakan kebijakannya.

Independensi

Undang-undang menjamin bahwa dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Tujuan utamanya adalah agar Bank Indonesia dapat menentukan kebijakannya secara jernih, rasional dan berwawasan jangka panjang, bebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Independensi bank sentral sekarang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Independensi akan menjadi bekal ampuh apabila diartikan dan diterapkan dengan benar.

Independensi tidak berarti bahwa kebijakan Bank Indonesia boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan institusi lain di tanah air. Ia tidak berarti bahwa Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Ia juga tidak berarti bahwa dalam urusan internal, Bank Indonesia bisa mengatur tatakerjanya, tatakelola keuangannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah *good governance* dan kepatutan yang berlaku di negeri ini, dan bebas dari supervisi pihak luar. Menerjemahkan independensi secara operasional ke dalam mekanisme pengambilan keputusan kebijakan, tatakerja dan tatakelola di dalam Bank Indonesia dan forum konsultasi dengan institusi lain adalah proses yang berkelanjutan dan harus menjadi program berkelanjutan pula.

Meskipun institusi semacam Dewan Moneter tidak ada lagi, forum konsultasi dan koordinasi antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan pemegang kebijakan sektor riil sangat diperlukan. Beberapa tahun terakhir ini sudah dilaksanakan secara reguler (setiap bulan) pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, untuk membahas perkembangan sebulan terakhir dan merumuskan langkah kebijakan selanjutnya. Para Menteri lain yang terkait dengan kebijakan yang dibahas juga diundang dalam rapat tersebut. Forum ini perlu dilanjutkan dan kapasitas "dapur bersamanya" untuk mengolah materi dan usulan kebijakan masih dapat ditingkatkan.

Kompetensi

Unsur penting lain pendukung kebijakan bank sentral yang efektif adalah kompetensi. Ini akhirnya ditentukan oleh kompetensi teknis dan profesionalisme para pejabatnya, secara individu dan terutama secara kelompok. Masing-masing individu harus kompeten di bidangnya dan mereka diorganisir sedemikian rupa sehingga tercipta kompetensi kolektif untuk menjawab masalah nyata yang dihadapi Bank Indonesia.

Saya melihat Bank Indonesia sekarang memiliki sumberdaya manusia kompeten yang memadai. Ini merupakan hasil dari program pendidikan yang dijalankan secara kontinu lebih dari satu dasawarsa terakhir ini. Program pendidikan perlu diteruskan, termasuk training

di lembaga-lembaga pelaku pasar untuk mengerti dan mendalami logika perilaku mereka, selain memperoleh ketrampilan praktis dan teknis yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah. Kebutuhan urgen akan tenaga-tenaga spesialis dapat direkrut dari pasar. Juga penting untuk selalu melakukan *benchmarking* sumberdaya manusia dengan bank sentral lain agar tidak ketinggalan kereta.

Kredibilitas

Kredibilitas adalah unsur penting lainnya bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kredibilitas sebuah bank sentral mirip dengan kredibilitas seseorang. Ia membuat bank sentral dihormati oleh pasar sehingga setiap kebijakannya direspons oleh para pelaku pasar dengan serius dan secara positif. Kebijakan yang kredibel mungkin diabaikan oleh pasar apabila bank sentralnya tidak kredibel. Kredibilitas bank sentral dibentuk oleh kumulasi persepsi pasar terhadap mutu dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan di masa lampau. Oleh karena itu harus ada tekad untuk setiap saat menjaga mutu setiap langkah kebijakannya.

Visi Bank Indonesia yang disampaikan kepada publik adalah pencerminan dari tekad untuk menjadikan bank sentral sebagai institusi yang kredibel secara nasional maupun internasional. Peluang bagi Bank Indonesia untuk mewujudkan tekad itu sesungguhnya masih terbuka luas. Mengapa?

Pertama, Bank Indonesia memiliki independensi yang dilindungi undang-undang. Kedua, seperti yang saya kemukakan tadi, Bank Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cakap dan handal. Bank Indonesia merupakan salah satu institusi publik yang kemampuan teknisnya terbaik di Indonesia. Saya harus katakan bahwa kombinasi antara independensi dan sumberdaya manusia yang handal merupakan hal yang langka dimiliki oleh suatu institusi publik di Indonesia. Karena itulah saya yakin bahwa di masa depan Bank Indonesia mampu mewujudkan visi yang mulia tersebut.

Anggota Komisi XI yang saya hormati,

Sekarang perkenankan saya untuk masuk dalam agenda kebijakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia beberapa tahun ke depan.

Undang-undang Bank Indonesia secara tegas menentukan 3 bidang tugas Bank Indonesia, yaitu:

- (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- (c) mengatur dan mengawasi bank.

Saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai langkah-langkah ke depan di ketiga bidang tugas tersebut. Tetapi sebelum itu perkenankan saya menyampaikan langkah-langkah yang sangat perlu dilakukan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan kinerja Bank Indonesia sebagai institusi. Ini penting terutama mengingat terjadinya kasus-kasus yang menimpa institusi ini akhir-akhir ini,

yang menurut pengamatan saya sangat mempengaruhi kinerjanya. Sebab hanya dengan institusi Bank Indonesia yang berjalan baik, maka ketiga tugas yang diamanatkan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Pertama, setelah terjadinya kasus-kasus hukum akhir-akhir ini, saya merasakan adanya penurunan semangat kerja dan kegamangan kerja di Bank Indonesia. Hal ini harus segera diatasi agar pelaksanaan fungsi dan tugas Bank Indonesia yang pengaruhnya luas bagi perekonomian nasional tidak terganggu. Dan ini adalah tugas siapapun yang menjadi pimpinan di Bank Indonesia. Pengembalian semangat kerja ini akan memakan waktu, tetapi tidak boleh terlalu lama. Dewan Gubernur perlu merumuskan upaya pengembalian semangat itu dengan langkah-langkah yang tepat. Upaya ini penting untuk dilakukan, sebab bank sentral yang gamang tidak mungkin mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Langkah kedua, yang masih terkait dengan respons terhadap peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, adalah bahwa pimpinan Bank Indonesia perlu membentuk semacam gugus tugas (*task force*). Tugasnya adalah untuk melihat apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam proses pengambilan keputusan dan tatacara penganggaran, terutama penggunaan anggaran, agar ada prosedur dan rambu-rambu yang jelas mengenai penggunaan anggaran yang benar dan wajar. Saya melihat hal ini sangat penting untuk

menghindari dan mencegah timbulnya musibah seperti yang dialami Bank Indonesia akhir-akhir ini di masa depan.

Anggota Dewan yang saya hormati

Beberapa Langkah Penting Bank Indonesia di Masa Depan

Sekarang perkenankan saya masuk ke dalam 3 bidang tugas Bank Indonesia di atas dan menggarisbawahi sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan beberapa waktu ke depan ini.

Pertama, bidang kebijakan moneter dan keuangan. Langkah penting yang perlu dituntaskan dalam waktu dekat ini adalah penyusunan landasan hukum serta protokol rinci mengenai pengambilan keputusan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal dalam situasi krisis. Dalam keadaan krisis tidak ada waktu yang cukup untuk berdebat. Keputusan-keputusan mendasar harus diambil cepat, terkoordinasi dan dilaksanakan dengan cepat dan terkoordinasi pula.

Perundangan yang ada sekarang belum dapat menampung pengambilan keputusan kebijakan dalam situasi krisis. Yang perlu segera disusun adalah suatu RUU Jaring Pengaman Keuangan yang mengatur pengambilan keputusan dalam menghadapi krisis, seperti diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004. Bersamaan dengan RUU tersebut harus disusun mekanisme dan protokol rinci mengenai pengambilan keputusan pada tingkat pelaksanaannya. Penyusunan

RUU, mekanisme dan protokol ini sudah dimulai oleh Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK) – suatu forum bersama Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Tugas ini harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sebab krisis dapat terjadi sewaktu-waktu. Tanpa payung hukum, mekanisme dan protokol tersebut tidak ada pejabat yang dapat atau mau mengambil keputusan.

Pengendalian Inflasi

Sekarang perkenankan saya untuk beralih dari masalah koordinasi kebijakan fiskal moneter ke masalah pengendalian inflasi.

Dari segi pengendalian inflasi, sistem *inflation-targetting* yang sekarang diterapkan Bank Indonesia nampaknya masih dapat disempurnakan, baik dari segi prinsip-prinsipnya maupun dari segi pelaksanaannya. Dalam sistem ini, sasaran inflasi ditentukan oleh Pemerintah dengan berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia menentukan langkah-langkah dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya. Sasaran-sasaran dan langkah-langkah ini semua kemudian dikomunikasikan kepada pasar dengan tujuan utama untuk mempengaruhi dan membentuk ekspektasi pasar terhadap inflasi (yang sering merupakan komponen penting penyebab inflasi).

Apabila ekspektasi inflasi dapat dipengaruhi, maka sasaran inflasi mempunyai peluang besar untuk dapat dicapai. Kuncinya disini

adalah kredibilitas dari sasaran dan langkah-langkah untuk mencapainya serta juga kredibilitas institusi Bank Indonesia sendiri.

Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan bahwa sistem *inflation-targetting* memerlukan sistem manajemen informasi dan komunikasi yang efektif dengan pelaku pasar. Menurut pandangan saya dalam mengelola informasi dan komunikasi efektif ini kita masih perlu memperbaiki kapasitas dan kemampuan kita.

Pengendalian inflasi di negara berkembang punya dimensi khusus. Berbeda dengan inflasi di negara-negara maju, inflasi di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang mempunyai dampak pada sisi suplai atau arus barang. Inflasi di negara-negara berkembang juga sering didominasi oleh perkembangan harga bahan-bahan kebutuhan pokok terutama pangan. Ini berarti bahwa dalam mengendalikan inflasi Bank Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pada sistem *inflation-targetting* murni, seperti yang dipraktekkan di negara-negara maju, tetapi harus didukung dengan berkoordinasi erat dengan otorita pengambil kebijakan sektoral yang mempengaruhi arus barang. Forum koordinasi yang efektif seperti yang saya sebutkan di atas menjadi suatu keharusan.

Tantangan lain bagi Bank Indonesia di bidang pengendalian inflasi di negara berkembang seluas Indonesia adalah adanya variasi regional yang besar. Inflasi nasional, yang menjadi barometer bagi para

pelaku pasar, sebenarnya adalah penjumlahan dari inflasi yang terjadi di daerah-daerah. Gerak inflasi di daerah tidak jarang sangat bervariasi karena faktor-faktor lokal. Oleh karena itu, di masa mendatang Bank Indonesia perlu meningkatkan koordinasinya dengan instansi-instansi di daerah untuk dapat mengendalikan inflasi "pada sumbernya" yaitu di daerah.

Peran Bank Indonesia di Forum Internasional

Dalam era globalisasi, Bank Indonesia harus meningkatkan kemampuan koordinasinya dan kemampuan diplomasinya dengan bank sentral lain. Sekarang ini, banyak forum internasional yang melibatkan dan menuntut peran bank sentral. Misalnya, dalam bidang moneter, Bank Indonesia telah menandatangani *Bilateral Swap Agreements* (BSA) dengan sejumlah bank sentral di Asia. Fasilitas ini berguna karena memberikan peluang bagi pesertanya untuk saling meminjam dana jangka pendek secara cepat apabila diperlukan, misalnya untuk menghadapi tekanan sementara di pasar devisanya. Fasilitas ini penting karena menambah fleksibilitas cadangan devisa kita. Namun mekanisme dan protokolnya harus diuji apakah dapat berjalan dengan lancar apabila nanti benar-benar dibutuhkan.

Agenda dalam Pengembangan Perbankan

Sekarang perkenankan saya beralih ke tugas di bidang perbankan. Di sini, agenda besarnya adalah melanjutkan (a) konsolidasi struktur perbankan nasionalnya sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, (b) penyempurnaan peraturan perbankan nasional agar makin konvergen dengan *international best practices*, termasuk inisiatif Basel II, dan (c) peningkatan efektivitas dan integritas sistem pengawasan perbankan nasional agar tidak hanya sejalan dengan *best practices* yang berlaku, tetapi juga mampu mengadaptasi dengan perkembangan nyata sektor keuangan di lapangan. Krisis *subprime mortgage* baru-baru ini adalah contoh di mana sistem pengawasan tertinggal oleh perkembangan pasar. Program-program ini berjangka panjang dan memerlukan konsistensi pelaksanaan kebijakannya.

Di bidang perbankan ada 2 isu khusus yang memerlukan perhatian Bank Indonesia, yaitu pengembangan perbankan syariah dan pembiayaan usaha kecil.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan sistem perbankan syariah di dalam negeri. Beberapa tahun terakhir ini perbankan syariah meningkat pesat, namun karena awalnya kecil sampai sekarang peranannya masih jauh dibanding dengan peran perbankan konvensional. Hal-hal yang perlu diselesaikan agar perbankan syariah

dapat berkembang lebih cepat lagi antara lain adalah pengesahan: (a) UU Pajak yang direvisi yang di dalamnya mengatur pengecualian transaksi perbankan syariah sebagai obyek pajak, (b) RUU Perbankan Syariah dan (c) RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembahasan kedua RUU yang disebut terakhir (b dan c) mengalami kemajuan yang baik dan perlu didorong untuk dapat disahkan tahun ini. Sementara itu pembahasan RUU Pajak masih mengalami kemandegan.

Isu khusus kedua adalah pembiayaan usaha kecil. Tersedianya sumber pembiayaan dari perbankan dalam negeri yang cukup dan dengan bunga wajar bagi usaha kecil dan menengah sangat penting. Berbeda dengan perusahaan besar, kebanyakan mereka tidak mempunyai akses terhadap pasar modal atau pinjaman luar negeri. Dalam kaitan ini Bank Indonesia perlu memberi dukungan maksimal, dalam batas-batas rambu prudensial yang wajar, perbankan yang memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah, seperti program Kredit Usaha Rakyat yang didukung oleh Pemerintah melalui penjaminan kredit dan subsidi bunga. Untuk kredit bagi usaha yang lebih kecil lagi – usaha mikro – keragaman lembaga pembiayaan mikro yang ada sekarang seharusnya dipertahankan dan dibakukan keberadaannya, selama memenuhi persyaratan prudensial yang wajar.

Pengembangan Sistem Pembayaran

Sekarang perkenankan saya masuk ke bidang tugas Bank Indonesia yang ketiga, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran bagi kehidupan ekonomi suatu negara dapat diibaratkan sebagai seluruh jaringan peredaran darah di tubuh manusia. Apabila darah berhenti beredar tubuh akan mati, apabila sistem pembayaran macet kegiatan ekonomi akan mandeg.

Efisiensi dan keamanan sistem pembayaran menentukan efisiensi dan kestabilan suatu perekonomian. Selanjutnya, sistem pembayaran yang aman dan efisien juga mendukung efektivitas kebijakan moneter karena sistem tersebut mempercepat pemrosesan transaksi sektor keuangan dan pasar modal.

Salah satu infrastruktur sistem pembayaran yang penting adalah BI-RTGS. Pemakaian BI-RTGS oleh dunia usaha dan masyarakat makin meningkat, suatu indikasi yang baik bagi perkembangan sistem pembayaran kita. Inisiatif Bank Indonesia untuk mulai mengkaji kemungkinan pengembangan BI-RTGS generasi kedua, yang dapat menyelesaikan transaksi *multi currency* dan dengan jangkauan *cross border* perlu diteruskan.

Yang juga perlu diprioritaskan adalah pengembangan sistem jasa pembayaran kepada Pemerintah, karena ini merupakan fondasi bagi koordinasi yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter pada

tataran operasional. Pada akhir tahun 2007 mulai diperkenalkan BIG-eB, suatu sistem pelayanan jasa pembayaran elektronik dengan Pemerintah. Saat ini sistem ini masih dalam tahap pengembangan awal dan sebaiknya dipercepat. Jika berfungsi penuh nantinya, sistem ini akan mendukung Departemen Keuangan dalam melaksanakan *cash management*, *forecasting* dan kegiatan pengelolaan keuangan negara lainnya.

Anggota Dewan yang saya hormati

Sebelum saya mengakhiri uraian ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ringkasan visi dan misi yang menjadi pedoman langkah-langkah saya jika dipercaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkuat fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk memperkuat fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia, memperkuat hubungan dengan pemerintah untuk: (1) memperkuat stabilitas sektor keuangan; (2) melanjutkan reformasi dalam sektor keuangan; (3) mengembangkan perbankan syariah dan akses pembiayaan bagi UKM.
- Memperkuat dan melaksanakan *good governance* baik untuk keperluan internal maupun eksternal Bank Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan

Saudara-saudara yang saya hormati

Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Pimpinan dan anggota Dewan, serta kepada saudara-saudara semua.

Jika mendapat dukungan Saudara-saudara, saya siap mengabdikan segenap pikiran dan waktu saya di sebuah lembaga dengan peranan yang vital dan strategis. Sebagai pribadi, saya merasa terhormat untuk dipercaya menjalankan tugas sepenting itu.

Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa selain dedikasi dan pengabdian yang sepenuh-penuhnya. Saya berharap, semoga dengan semua itu, saya, dan kita semua, dapat memberikan yang terbaik serta menyumbangkan dharma bakti kita kepada bangsa tercinta ini.

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Boediono
Tempat Lahir : Blitar
Tanggal Lahir : 25 Februari 1943
N I P : 130701696
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Guru Besar

PEKERJAAN

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Dosen Fakultas Ekonomi UGM

ALAMAT KANTOR

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

ALAMAT RUMAH

- Sawitsari M2, Yogyakarta
- Jl. Mampang Prapatan XX, No.26, Jakarta Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1967 Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia
1972 Master of Economics, Monash University, Australia
1979 Ph.D in Business Economics, Wharton School, University of Pennsylvania, USA
2006 Profesor, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

RIWAYAT PEKERJAAN

1973 – sekarang Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada
2005 – sekarang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu
2001 – 2004 Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong
1998 – 1999 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas dalam Kabinet Reformasi Pembangunan
1993 – 1998 Direktur Bank Indonesia

TANDA JASA

1999 Bintang Mahaputra Adipradana